

**IMPLEMENTASI KEBIJAKAN PEMBELAJARAN DALAM JARINGAN (DARING) DI
SMP NEGERI 3 TANJUNGPINANG SELAMA MASA PANDEMI COVID-19 TAHUN 2020**

Muhammad Afhan¹, Nur Aslamaturrahmah Dwi Putri², Novi Winarti³
afhanmhmd@gmail.com

Program Studi Ilmu Pemerintahan, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik
Universitas Maritim Raja Ali Haji

ABSTRACT

Currently, our country is hit by a major disaster, namely an epidemic or virus that attacks humans around the world, known as COVID 19, which affects all aspects of life including the education sector. In overcoming this problem, the Ministry of Education and Culture issued a policy through circular letter Number 15 of 2020 concerning Guidelines for Implementing Learning from Home in an Emergency for the Spread of COVID-19. SMP Negeri 3 Tanjungpinang is one of the schools that implements an online home learning policy. In this online learning from home policy, of course, there are several problems during this policy such as children's interest in online learning, communication between teachers, students and parents and also resources such as teacher skills in mastering gadgets, availability of internet or wifi networks or owning gadgets. Therefore, of course, the school has provided a solution to this problem so that learning activities online during the COVID-19 pandemic can be carried out as well as possible.

Keywords: Implementation, Policy, Network Learning, COVID-19.

¹ Mahasiswa Program Studi Ilmu Pemerintahan FISIP UMRAH

² Dosen Program Studi Ilmu Pemerintahan FISIP UMRAH

³ Dosen Program Studi Ilmu Pemerintahan FISIP UMRAH

I. Pendahuluan

Saat ini negara kita sedang di landa musibah besar, yaitu adanya wabah atau virus yang menyerang manusia di seluruh dunia yaitu dikenal dengan *COVID 19*, dimana wabah atau virus ini menyerang siapapun, sehingga menyebabkan Negara kita Indonesia juga harus sangat waspada, dan menetapkan untuk melakukan kegiatan di rumah saja, serta harus social distancing untuk menjaga agar memperlambat penyebaran *COVID 19*.

Menurut WHO (2019) *Coronavirus* merupakan keluarga besar virus yang menyebabkan penyakit pada manusia dan hewan. Pada manusia biasanya menyebabkan penyakit infeksi saluran pernapasan, mulai flu biasa hingga penyakit yang serius seperti *Middle East Respiratory Syndrome (MERS)* dan Sindrom Pernafasan Akut Berat/ *Severe Acute Respiratory Syndrome (SARS)*(Nahdi et al., 2020; Wax & Christian, 2020). *Coronavirus* jenis baru yang ditemukan pada manusia sejak kejadian luar biasa muncul di Wuhan Cina, pada Desember 2019, kemudian diberi nama *Severe Acute Respiratory Syndrome Coronavirus 2 (SARS-COV2)*, dan menyebabkan penyakit *Coronavirus Disease-2019 (COVID-19)*.

Adanya pandemi *COVID 19* membuat semua sarana mati atau di tutup sementara, termasuk kegiatan belajar mengajar. Walaupun belajar secara tatap muka tidak memungkinkan dikarenakan pandemi, maka Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nadiem Makarim mengeluarkan kebijakan bahwasanya belajar tetap dilaksanakan namun dari rumah masing masing dan secara online atau dalam jaringan (daring). Melalui surat edaran Kemendikbud No.4 Tahun 2020 mengenai Pelaksanaan Pendidikan Dalam Masa Darurat *Coronavirus Disease (Covid-19)*, pembelajaran dilaksanakan dari rumah secara dalam jaringan serta Ujian Nasional untuk tahun ajaran 2019/2020 ditidakan. Kemudian Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nadiem Makarim pada hari Senin, 18 Mei 2020, mengeluarkan Surat Edaran Sekretaris Jendral Nomor 15 Tahun 2020 tentang Pedoman Pelaksanaan Belajar Dari Rumah Dalam Masa Darurat Penyebaran COVID-19.

Dalam surat edaran tersebut, Kemendikbud menguraikan beberapa metode dan media pelaksanaan belajar dari rumah yang dibagi dari dua pendekatan, yaitu pembelajaran jarak jauh dalam jaringan (daring) dan pembelajaran jarak jauh luar jaringan (luring). Dimana dalam dua cara tersebut, satuan pendidikan dapat memilih pendekatan secara daring, luring atau kombinasi keduanya sesuai dengan ketersediaan dan kesiapan sarana dan prasarana. Dalam pembelajaran di rumah secara daring dapat menggunakan media gawai (gadget) maupun laptop melalui beberapa portal dan aplikasi pembelajaran daring. Sedangkan dalam pembelajaran di rumah secara luring dapat dilaksanakan dengan mengikuti program belajar dari rumah melalui TVRI, radio, modul belajar mandiri, bahan ajar cetak dan alat peraga dan media belajar dari benda dan lingkungan sekitar.

Pemerintah Kota Tanjungpinang sendiri cukup tanggap dalam menghadapi situasi pandemi *COVID-19* dengan mengeluarkan surat edaran Walikota nomor 422.1/424/5.3/01/2020 mengenai perpanjangan pelaksanaan kegiatan belajar mengajar di rumah mulai dari tanggal 1 April hingga 21 April 2020. Kemudian kembali belajar di rumah mulai dari tanggal 27 April hingga 25 Mei 2020 dikarenakan pada tanggal 22 April hingga 25 April 2020 merupakan hari libur awal menyambut bulan suci Ramadhan 1441 H. Karena situasi untuk belajar di sekolah masih belum memungkinkan, Pemerintah Kota Tanjungpinang kembali mengeluarkan surat edaran Walikota nomor

422.1/733/5.3.01/2020 mengenai kegiatan belajar di rumah setelah hari raya Idul Fitri 1441 H, dimulai pada tanggal 26 Mei 2020 hingga 26 Juni 2020. Dan pembelajaran di rumah secara daring kembali diperpanjang hingga semester ganjil tahun ajaran 2020/2021.

Dinas Pendidikan Kota Tanjungpinang sebagai instansi pemerintahan yang diberikan kewenangan untuk mengatur kegiatan belajar mengajar mulai dari PAUD hingga SMP turut memberikan instruksi kepada sekolah-sekolah agar melaksanakan kegiatan belajar mengajar secara *online* atau dalam jaringan (selanjutnya disebut daring) hingga tahun ajaran baru 2020/2021. Berdasarkan isi Surat Keputusan Bersama (SKB) empat menteri, kegiatan belajar mengajar di sekolah bisa dimulai pada September 2020 di semester ganjil tahun ajaran 2020/2021. Namun, kebijakan itu dilakukan apabila di daerah kota Tanjungpinang sudah ditetapkan sebagai daerah zona hijau atau zona kuning. Hal ini disampaikan oleh Kepala Dinas Pendidikan Kota Tanjungpinang, Atmadinata. (Detiknews,2020).

Kegiatan belajar di rumah dengan sistem *online* atau daring digunakan sebagai cara untuk tetap memberikan pembelajaran selama masa pandemi *COVID-19* meskipun tidak melalui tatap muka. Dalam mempersiapkan kegiatan belajar mengajar ataupun prosedur administrasi sekolah secara *online* atau daring selama pandemi, Pemerintah melalui Kemendikbud dan Dinas Pendidikan memberikan penyuluhan maupun pelatihan kepada Kepala Sekolah, Guru mata pelajaran maupun tenaga kependidikan mengenai kebijakan belajar daring menggunakan media *online video call* seperti *Zoom* dan *Google Meet* atau aplikasi yang mempermudah kegiatan belajar mengajar. Mereka juga dilatih dan diberikan berbagai penyesuaian perangkat pembelajaran seperti rencana pelaksanaan pembelajaran (RPP), Silabus, dan materi pelajaran menjadi menarik dan sesuai dengan kondisi pandemi saat ini agar walaupun kondisi kegiatan belajar mengajar tidak dilakukan dengan tatap muka, peserta didik dapat memahami materi pelajaran dengan sistem belajar daring.

SMP Negeri 3 Tanjungpinang merupakan salah satu sekolah yang melaksanakan kegiatan belajar di rumah melalui *online* atau daring. Sekolah yang berlokasi di Jalan Sawi No. 16, kelurahan Bukit Cermin, kecamatan Tanjungpinang Barat ini memiliki peserta didik berjumlah 384 siswa/i dengan guru berjumlah 25 orang dan staf tata usaha berjumlah 6 orang. (Dapodik, Juli 2020). Terletak di pusat kota, SMP Negeri 3 Tanjungpinang berupaya agar tenaga pendidik dan tenaga kependidikan dapat bekerjasama dalam pelaksanaan belajar secara daring selama wabah pandemi ini. Berbagai permasalahan yang akan dihadapi selama belajar menggunakan sistem daring antara lain adalah tidak semua peserta didik tidak memiliki handphone ataupun gadget, kuota internet, peran orangtua selaku pengawas anak belajar di rumah, kemahiran guru dalam menggunakan gadget, kerjasama antar stakeholder, serta sumber daya teknologi.

II. Metode Penelitian

Dalam penelitian ini, Peneliti menggunakan bentuk penelitian deskriptif dengan menggunakan pendekatan kualitatif. Penelitian deskriptif adalah penelitian yang diarahkan untuk memberikan gejala-gejala, fakta-fakta, atau kejadian-kejadian secara sistematis dan akurat, mengenai sifat-sifat populasi atau daerah tertentu. Penelitian deskriptif adalah penelitian yang berusaha untuk menuturkan pemecahan masalah yang ada pada saat sekarang berdasarkan data-data. Maka penelitian deskriptif

juga akan menyajikan data, menganalisa, dan menginterpretasikan serta bisa bersifat komparatif dan korelatif

Penelitian kualitatif juga merupakan penelitian dengan metode pengumpulan fakta detail sebanyak mungkin dan secara mendalam mengenai suatu masalah atau gejala untuk mendapat pengertian sifat masalah atau gejala yang diteliti tersebut. Maka dalam penelitian ini, metode penelitian kualitatif digunakan untuk mengumpulkan data, melihat dan mengetahui bagaimana implementasi kebijakan pembelajaran dari rumah secara daring di SMP Negeri 3 Tanjungpinang. Dalam penelitian ini, yang menjadi informan adalah sebagai berikut:

Tabel 1. Informan Penelitian
Informan yang akan diwawancarai

No	Informan	Jumlah Orang
1.	Plt. Kepala SMP Negeri 3 Tanjungpinang	1 orang
2.	Wakil Kepala SMP Negeri 3 Tanjungpinang	1 orang
3.	Guru SMP Negeri 3 Tanjungpinang	3 orang
4.	Wali Murid Peserta Didik SMP Negeri 3 Tanjungpinang	3 orang
	Jumlah	8 orang

Sumber: Data Olahan Peneliti, 2020.

III. Hasil dan Pembahasan

Proses kegiatan belajar dapat diartikan sebagai sebuah interaksi antar individu dengan lingkungan, lingkungan dalam artian merupakan tempat yang dapat menjadikan individu untuk memperoleh pengalaman, pengalaman yang pernah didapatkan atau ditemui dapat menyebabkan perhatian bagi setiap individu sehingga dapat menjadi sebuah interaksi (Aunurrahman, 2013:36). SMP Negeri 3 Tanjungpinang merupakan salah satu sekolah di kota Tanjungpinang yang melaksanakan kegiatan BDR secara daring. Dimulai dari tanggal 16 Maret 2020, kemudian dilanjutkan kembali pada tahun ajaran baru 2020/2021 dikarenakan kondisi di Kota Tanjungpinang belum memungkinkan untuk melakukan pembelajaran secara tatap muka. Kebijakan ini dilaksanakan sebagaimana sesuai dengan surat edaran Kemendikbud nomor 15 tahun 2020 tentang Pedoman Pelaksanaan Belajar Dari Rumah.

Berdasarkan hasil temuan peneliti diperoleh perencanaan kegiatan pembelajaran jarak jauh digunakan untuk menghadapi pembelajaran di tengah-tengah pandemi COVID-19 yang sedang berlangsung. Pembelajaran tetap harus dilakukan karena setiap peserta didik berhak menerima materi pembelajaran selayaknya ketika belajar disekolah, pembelajaran jarak jauh juga merupakan cara alternatif untuk melaksanakan kegiatan pendidikan. Pembelajaran jarak jauh memerlukan rencana untuk proses penerapannya, karena adanya pandemi COVID-19 ini dimana belajar yang biasanya dilakukan disekolah sekarang dilakukan secara daring. Hal ini disampaikan oleh Plt. Kepala SMP Negeri 3 Tanjungpinang, Dra. Nina Ernawati. M.Pd dalam wawancara berikut: *“Dengan diberlakukannya Kegiatan BDR secara daring, para peserta didik tetap melaksanakan kegiatan belajar mengajar secara online. Para guru dianjurkan untuk menggunakan aplikasi online seperti WA, Google Meet dan Google Form sebagai platform yang mendukung terlaksananya kegiatan belajar mengajar.”*

Model pembelajaran merupakan kerangka konseptual yang menggambarkan prosedur dalam mengorganisasikan pengalaman pembelajaran untuk mencapai tujuan pembelajaran (Suprihatiningrum, 2013:142). Yang perlu dipersiapkan untuk menjalankan kegiatan pembelajaran jarak jauh yaitu perangkat keras yang berupa handphone atau laptop, serta kuota internet yang dapat menunjang proses kegiatan pembelajaran jarak jauh agar dalam prosesnya dapat berjalan dengan baik dan optimal. Strategi yang digunakan dalam pembelajaran jarak jauh guru adalah para guru menyampaikan materi terlebih dahulu dan dishare menggunakan aplikasi penunjang seperti *Learning Management System (LMS)*. LMS merupakan sistem pengelolaan pembelajaran terintegrasi secara daring melalui aplikasi seperti *Google Classroom* dan juga menggunakan buku pelajaran yang sudah dipinjam peserta didik di perpustakaan SMP Negeri 3 Tanjungpinang setiap semester baru. Sehingga, guru tidak hanya langsung memberi penugasan kepada siswa tanpa memberikan materi pembelajaran terlebih dahulu. Adapun model pembelajaran yang di terapkan oleh guru di SMP Negeri 3 Tanjungpinang yaitu menggunakan video pembelajaran, *video conference* via *Google Meet*, penugasan tertulis, maupun praktek seperti yang sudah dipaparkan dalam wawancara yang dilakukan oleh peneliti dengan guru kelas VII SMP Negeri 3 Tanjungpinang sebagai berikut: “*Para peserta didik diberikan materi pembelajaran dan tugas untuk mengerjakan soal-soal, dan mempraktikkan sebuah adegan sesuai dari materi pembelajaran dengan memvideokan tugas tersebut, kemudian dikirimkan kepada guru yang bersangkutan via Google Classroom.*”

Dalam pelaksanaan kegiatan belajar mengajar tentunya mempunyai program pembelajaran. Untuk menyesuaikan kondisi saat ini yang tidak memungkinkan untuk belajar secara tatap muka, model rencana pelaksanaan pembelajaran (RPP) yang digunakan dalam pembelajaran daring selama masa pandemi COVID-19 di SMP Negeri 3 Tanjungpinang adalah RPP satu lembar atau disebut RPP Merdeka yang sesuai dengan anjuran pemerintah, seperti yang dipaparkan oleh wakil kepala SMPN 3 Tanjungpinang, Ibu Herdaleny, S.Pd. Ing dalam wawancara sebagai berikut: “*Di SMP Negeri 3 Tanjungpinang ini, dalam melaksanakan kegiatan belajar mengajar para guru menggunakan RPP satu lembar yaitu RPP Merdeka*”. Proses penilaian peserta didik atau evaluasi yang dilakukan oleh guru SMP Negeri 3 Tanjungpinang yaitu dengan memberikan tugas tertulis dan tugas praktek kepada peserta didik. Selain dilakukan secara daring, proses penilaian pesertya didik juga dilakukan dengan cara peserta didik mengantarkan tugas tertulis ke sekolah dengan mematuhi protokol kesehatan. Seperti yang dipaparkan oleh guru kelas IX dalam wawancara, sebagai berikut: “*Tugas tertulis yang diberikan oleh guru kelas tidak hanya melalui aplikasi saja. Namun untuk pemberian dan pengumpulan tugas tertulis juga dilakukan secara langsung ke sekolah oleh siswa dengan menghuubungi terlebih dahulu guru yang bersangkutan.*”

Menurut pandangan Edward III (dalam Subarsono, 2011: 90-92) dalam implementasi kebijakan dipengaruhi oleh empat variabel, Komunikasi (*communications*), Sumber Daya (*resources*), sikap (*dispositions* atau *attitudes*) dan struktur birokrasi (*bureucratic structure*). Ke empat faktor di atas harus dilaksanakan secara simultan karena antara satu dengan yang lainnya memiliki hubungan yang erat. Tujuan kita adalah meningkatkan pemahaman tentang implementasi kebijakan. Penyederhanaan pengertian dengan cara *membreakdown* (diturunkan) melalui eksplanasi implementasi kedalam komponen prinsip.

1. Komunikasi (*communications*)

Implementasi akan berjalan efektif apabila ukuran-ukuran dan tujuan-tujuan kebijakan dipahami oleh individu-individu yang bertanggungjawab dalam pencapaian tujuan kebijakan. Kejelasan ukuran dan tujuan kebijakan dengan demikian perlu dikomunikasikan secara tepat dengan para pelaksana. Konsistensi atau keseragaman dari ukuran dasar dan tujuan perlu dikomunikasikan sehingga implementors mengetahui secara tepat ukuran maupun tujuan kebijakan itu. Komunikasi dalam organisasi merupakan suatu proses yang amat kompleks dan rumit. Seseorang bisa menahannya hanya untuk kepentingan tertentu, atau menyebarkanluaskannya. Di samping itu sumber informasi yang berbeda juga akan melahirkan interpretasi yang berbeda pula. Agar implementasi berjalan efektif, siapa yang bertanggungjawab melaksanakan sebuah keputusan harus mengetahui apakah mereka dapat melakukannya. Komunikasi menjadi aspek penting dalam keberhasilan implementasi kebijakan. Tujuannya agar para pelaku implementasi mengetahui apa yang harus dilakukan, dimana yang menjadi tujuan dan sasaran kebijakan harus ditransmisikan kepada kelompok sasaran (*target group*), sehingga akan mengurangi penyimpangan implementasi.

Berdasarkan surat edaran Disdik Kota Tanjungpinang mengenai kegiatan pembelajaran dari rumah, Kepala Sekolah mengabarkan hal tersebut kepada guru-guru beserta tata usaha bahwasanya belajar tatap muka diganti menjadi belajar di rumah secara daring. Kemudian para wali kelas menyampaikan kepada peserta didik dan juga orang tua melalui *Whatsapp* Grup mengenai prosedur kegiatan belajar secara daring. Hal ini disampaikan oleh Plt. Kepala SMP Negeri 3 Tanjungpinang, Ibu Dra. Nina Ernawati. M. Pd sebagai berikut: *“Setelah pihak dinas mengabarkan bahwa sekolah tatap muka ditiadakan dan belajar secara dari rumah via daring dilaksanakan, saya mengabarkan kepada teman-teman (Guru dan TU) untuk diketahui bersama. Saya menugaskan kepada wakil kepala untuk membuat jadwal pelajaran dan piket guru menyesuaikan dengan kondisi dana apa yang sudah dipaparkan oleh dinas dan kemendikbud perihal sistematik belajar daring ini.”*

Kunci penting dalam keberhasilan pembelajaran daring ini adalah komunikasi antar wali kelas dengan orang tua peserta didik. Karena dalam proses kegiatan pembelajaran ini peserta didik tidak dapat bertatap muka langsung dengan guru. Maka orang tua yang menjadi guru utama dan juga pengawas tingkah laku anak dirumah. Berbagai macam latar belakang pekerjaan orang tua peserta didik membuat pembelajaran daring itu sendiri menjadi kurang maksimal, dikarenakan orang tua siswa tidak dapat mendampingi anaknya dalam mengikuti pembelajaran daring sehingga berdampak pada kurangnya efektifitas dan efisiensi waktu dalam proses pembelajaran daring sebagaimana wawancara kami dengan orang tua wali murid kelas VII sebagai berikut: *“Kami sebagai orangtua kadang kewalahan memantau anak kami dalam belajar daring ini. Karena tidak setiap hari kami ada dirumah. Salah satu dari kami bekerja sampai malam sehingga tidak sempat menanyakan perihal sudah belajarkah atau sudah mengerjakan tugas kepada anak.”*

Dikarenakan pembelajaran dan penilaian peserta didik dilaksanakan secara daring, para guru diharuskan untuk selalu siap mendampingi siswa dari pagi hingga malam hari. Hal ini berkaitan dengan kinerja guru, dimana yang seharusnya guru mempersiapkan materi untuk hari berikutnya namun guru masih merasa terbebani oleh materi yang belum tuntas dihari tersebut. Hal ini disampaikan oleh guru kelas VIII SMP Negeri 3 Tanjungpinang selama wawancara dengan peneliti yaitu sebagai berikut: *“Guru mesti siaga sampai malam menunggu siswa mengirimkan tugasnya. Dan mesti rajin mengingatkan di grup siswa bahwasanya bila ada tugas segera dibuat dan jangan pas deadline. Adapun kesulitan yang ditemui bahwa para beberapa peserta didik tidak memiliki gadget*

pribadi dan meminjam hp orang tua dan kakak atau abangnya. Sehingga mungkin ada pesan yang tidak terbaca oleh peserta didik dan akhirnya peserta didik tidak tahu bahwa ada materi atau tugas yang diberikan.”

2. Sumberdaya (*resources*)

Meskipun isi kebijakan telah dikomunikasikan secara jelas dan konsisten, tetapi apabila implementor kekurangan sumberdaya untuk melaksanakan, maka implementasi tidak akan berjalan efektif. Komponen sumberdaya ini meliputi jumlah staf, keahlian dari para pelaksana, informasi yang relevan dan cukup untuk mengimplementasikan kebijakan dan pemenuhan sumber-sumber terkait dalam pelaksanaan program, adanya kewenangan yang menjamin bahwa program dapat diarahkan kepada sebagaimana yang diharapkan, serta adanya fasilitas-fasilitas pendukung yang dapat dipakai untuk melakukan kegiatan program seperti dana dan sarana prasarana. Sumberdaya manusia yang tidak memadai (jumlah dan kemampuan) berakibat tidak dapat dilaksanakannya program secara sempurna karena mereka tidak bisa melakukan pengawasan dengan baik. Jika jumlah staf pelaksana kebijakan terbatas maka hal yang harus dilakukan meningkatkan skill/kemampuan para pelaksana untuk melakukan program. SMP Negeri 3 Tanjungpinang memiliki 25 guru (Dapodik, Juli 2020), dimana guru berusia 50 tahun keatas berjumlah 8 guru dan guru berusia 50 tahun kebawah berjumlah 17 guru. Karena sebagian besar guru SMPN 3 Tanjungpinang berusia 50 tahun kebawah, tentunya mereka lebih mudah untuk belajar dan lebih cakap untuk terbiasa mengajar menggunakan *gadget* maupun aplikasi online.

Untuk membantu para guru yang kesulitan menggunakan *gadget* atau membuat media pembelajaran secara online, Plt. Kepala SMP Negeri 3 Tanjungpinang menunjuk 3 guru yang dirasa memiliki kemampuan lebih dalam menggunakan *gadget* maupun media pembelajaran online. Ketiga guru itu membantu para guru yang kesulitan mengoperasikan *gadget* agar bisa mengajar secara online. Mereka dibagi tugas satu guru mengampu satu jenjang kelas, yaitu kelas VII, VIII, dan IX. Hal ini disampaikan oleh Plt. Kepala SMP Negeri 3 Tanjungpinang, Ibu Dra. Nina Ernawati, M. Pd melalui wawancara berikut: “*Kami menunjuk Ibu Susi, Ibu Anggi dan Ibu Silvita, masing masing memegang kelas VII, VIII dan IX. Untuk membantu para guru yang mungkin tidak bisa atau kesulitan menggunakan komputer ataupun ingin mengajar melalui Google Meet.*”

Kemudian wakil kepala SMP Negeri 3 Tanjungpinang menambahkan lewat wawancara dengan peneliti sebagai berikut: “*Mereka membantu para bapak bapak maupun ibu ibu yang memang tidak ahli dalam mengoperasikan perangkat secara daring. Agar para peserta didik maupun guru dalam melakukan kegiatan belajar mengajar dengan baik walaupun tidak tatap muka.*” Selain itu, para guru juga diberikan pelatihan bagaimana membuat materi pembelajaran maupun program pembelajaran menggunakan *Google Meet*, *Whatsapp*, *Google Classroom* maupun aplikasi yang mempermudah pembelajaran secara daring. Pelatihan dilakukan dengan cara mengikuti webinar online secara mandiri ataupun otodidak dengan menonton tutorial *Youtube*.

3. Disposisi (*dispositions*)

Disposisi adalah watak dan karakteristik yang dimiliki oleh pelaku implementasi, seperti komitmen, kejujuran, sifat demokratis. Apabila implementor memiliki disposisi yang baik, maka implementor tersebut dapat menjalankan kebijakan dengan baik seperti apa yang diinginkan oleh

pembuat kebijakan. Ketika implementor memiliki sikap atau perspektif yang berbeda dengan pembuat kebijakan, maka proses implementasi kebijakan juga menjadi tidak efektif. Dukungan dari pimpinan sangat mempengaruhi pelaksanaan program dapat mencapai tujuan secara efektif dan efisien. Untuk tidak terjadi ketimpangan dan kesalahpahaman dalam pengimplementasian pembelajaran dalam jaringan, dalam pelaksanaan BDR secara daring ini, Kepala Sekolah bersama Wakil Kepala, dan Guru bahu membahu dalam menjalankan BDR secara daring dengan semaksimal mungkin. Seperti melakukan rapat melalui aplikasi *Zoom* ataupun rapat secara tatap muka namun tetap dengan mematuhi protokol kesehatan, Kepala sekolah bersama wakil dan guru-guru mata pelajaran membahas tentang bagaimana menyusun RPP maupun program pembelajaran yang sesuai dengan kondisi pandemi ini.

Dalam melaksanakan kegiatan pembelajaran daring tentu berbeda dengan kegiatan pembelajaran secara langsung tatap muka di dalam kelas. Dalam mengimplementasikan pembelajaran daring, guru tentu harus melibatkan orang tua, dimana peran orang tua adalah kunci sukses dari proses pembelajaran daring itu sendiri. Dalam pembelajaran daring pun, diperlukan kualitas sinyal yang stabil maupun kuota internet yang memadai guna menunjang keberhasilan pembelajaran daring. Sinyal yang stabil dapat mempermudah guru maupun peserta didik dalam mengakses aplikasi yang menjadi penunjang dalam kegiatan belajar secara daring. Oleh karena itu, sekolah memfasilitasi wifi untuk guru sebagai sarana untuk memberikan materi pembelajaran daring selama guru masih berada dilingkungan sekolah. Namun jaringan wifi tersebut hanya bisa digunakan ketika guru masih di dalam lingkungan sekolah. Hal ini disampaikan oleh Plt. Kepala SMP Negeri 3 Tanjungpinang, Ibu Dra. Nina Ernawati M.Pd dalam wawancara sebagai berikut: *“Untuk membantu guru-guru dalam menggunakan aplikasi secara online, sekolah menyediakan dua wifi dengan kecepatan masing masing 20 Mbps. Tujuannya supaya mempermudah guru mengolah data tugas peserta didik dan juga membantu guru melakukan Google Meet dengan peserta didik.”*

Selain wifi yang disediakan sekolah, pada bulan September Kemendikbud meresmikan bantuan kuota data internet kepada guru guru dan peserta didik. Alokasi kuota yang diberikan yakni untuk peserta didik Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) sebanyak 20 GB/bulan, peserta didik jenjang pendidikan dasar dan menengah 35 GB/bulan, pendidik pada PAUD dan jenjang pendidikan dasar dan menengah 42 GB/bulan, serta untuk mahasiswa dan dosen 50 GB/bulan. Seluruhnya mendapatkan kuota umum sebesar 5 GB/bulan, sisanya adalah untuk kuota belajar (Kemendikbud, 2020). Mekanisme pemberian bantuan kuota data internet diawali dengan pendataan dan verifikasi nomor ponsel. Kedua, Kemendikbud melakukan verifikasi dan validasi nomor ponsel oleh operator seluler. Ketiga, penerbitan Surat Pernyataan Tanggung Jawab Mutlak (SPTJM). Dan terakhir, pemutakhiran nomor ponsel. Kemudian masing masing instansi mengirimkan data nomor hp guru dan peserta didik yang aktif untuk dapat diberikan bantuan data kuota internet oleh Kemendikbud. Plt. Kepala SMP Negeri 3 Tanjungpinang, Dra. Nina Ernawati, M.Pd menyampaikan kepada peneliti dalam wawancara sebagai berikut: *“Jadi kami meminta bantuan kepada setiap wali kelas untuk mendata nomor handphone peserta didik dan memberikan kepada dapodik sekolah untuk dapat bantuan data dari Kemendikbud. Para guru yang terdaftar dalam dapodik juga mendapatkan bantuan data berupa paket internet yang langsung dikirim kepada tiap tiap guru apabila nomor hp yang terdaftar aktif.”*

4. Struktur Birokrasi (*bureucratic structure*)

Struktur organisasi yang bertugas mengimplementasikan kebijakan memiliki pengaruh yang signifikan terhadap implementasi kebijakan. Menurut pandangan Edwards (dalam Budi Winarno, 2008: 181) sumber-sumber yang penting meliputi, staff yang memadai serta keahlian-keahlian yang baik untuk melaksanakan tugas-tugas mereka, wewenang dan fasilitas-fasilitas yang diperlukan untuk menerjemahkan usul-usul di atas kertas guna melaksanakan pelayanan-pelayanan publik. Struktur birokrasi adalah karakteristik, norma-norma, dan pola-pola hubungan yang terjadi berulang-ulang dalam badan-badan eksekutif yang mempunyai hubungan baik potensial maupun nyata dengan apa yang mereka miliki dalam menjalankan kebijakan. Struktur Birokrasi menurut Edwards (dalam Budi Winarno, 2008: 203) terdapat dua karakteristik utama, yakni *Standard Operating Procedures* (SOP) dan Fragmentasi. SOP atau prosedur-prosedur kerja ukuran-ukuran dasar berkembang sebagai tanggapan internal terhadap waktu yang terbatas dan sumber-sumber dari para pelaksana serta keinginan untuk keseragaman dalam bekerjanya organisasi - organisasi yang kompleks dan tersebar luas. Sedangkan fragmentasi berasal dari tekanan-tekanan diluar unit-unit birokrasi, seperti komite-komite legislatif, kelompok-kelompok kepentingan pejabat-pejabat eksekutif, konstitusi negara dan sifat kebijakan yang mempengaruhi organisasi birokrasi pemerintah.

Dalam surat edaran Kemendikbud Nomor 15 Tahun 2020 mengenai Pedoman Pelaksanaan Belajar Dari Rumah Dalam Masa Darurat Penyebaran COVID-19, Kepala sekolah memiliki SOP dalam pelaksanaan BDR yaitu sebagai berikut:

- a. Menetapkan model pengelolaan satuan pendidikan selama BDR, diantaranya:
 - 1) Bekerja dan mengajar dari rumah bagi guru dan tenaga kependidikan.
 - 2) Menentukan jadwal piket apabila diperlukan. Dalam hal dilakukan piket hendaknya berkoordinasi dengan dinas pendidikan dan gugus tugas penanganan COVID-19 setempat.
- b. Memastikan sistem pembelajaran yang terjangkau bagi semua peserta didik termasuk peserta didik penyandang disabilitas.
- c. Membuat rencana keberlanjutan pembelajaran. Jika masa darurat COVID-19 dan kegiatan BDR diperpanjang maka perlu mengoordinir para guru untuk berkreasi dengan menggunakan bahan ajar yang terdiri dari:
 - 1) Instruksi dan materi pembelajaran daring dengan menggunakan media dan sumber belajar daring.
 - 2) Instruksi dan materi pembelajaran luring dengan menggunakan televisi, radio, buku, dan modul pembelajaran mandiri peserta didik.
 - 3) Intruksi untuk melakukan adaptasi materi pembelajaran untuk peserta didik penyandang disabilitas.
- d. Melakukan pembinaan dan pemantauan kepada guru melalui laporan pembelajaran yang dikumpulkan setiap minggu
 - 1) Memastikan guru memfasilitasi pembelajaran jarak jauh baik secara daring maupun luring;
 - 2) Memastikan rencana pelaksanaan pembelajaran menerapkan pembelajaran bermakna, kegiatan kecakapan hidup dan aktivitas fisik
 - 3) Memastikan adanya materi edukasi untuk orang tua/wali peserta didik terkait pencegahan COVID-19 dan menerapkan pola perilaku hidup bersih di rumah.
- e. Memastikan ketersediaan sarana dan prasarana yang dimiliki guru dalam memfasilitasi pembelajaran jarak jauh baik secara daring maupun luring selama darurat COVID-19.
 - 1) Ketersediaan gawai/komputer/laptop untuk fasilitas pembelajaran

daring.

2) Akses ke media pembelajaran daring dan luring.

3) Distribusi sarana pembelajaran luring dan alat peraga ke rumah peserta didik termasuk alat peraga pendidikan bagi peserta didik penyandang disabilitas (bagi yang tidak memiliki akses ke pembelajaran daring).

f. Membuat program pengasuhan untuk mendukung orang tua/wali dalam mendampingi peserta didik belajar, minimal satu kali dalam satu minggu.

g. Memberikan laporan secara berkala kepada dinas pendidikan dan/atau pos pendidikan daerah terkait:

1) Kondisi kesehatan warga satuan pendidikan;

2) Metode pembelajaran jarak jauh yang digunakan (daring/luring/kombinasi daring dan luring);

3) Jumlah peserta didik yang belum bisa terlayani;

4) Kendala pelaksanaan BDR; dan

5) Praktik baik dan capaian hasil belajar peserta didik.

Kemudian, guru memfasilitasi pelaksanaan PJJ secara daring, luring atau kombinasi keduanya sesuai kondisi dan ketersediaan sarana pembelajaran. Adapun poin poin dalam tugas guru selama pembelajaran dari rumah adalah sebagai berikut:

a. Mempersiapkan rencana pembelajaran jarak jauh (RPP) jarak jauh,

b. Kegiatan belajar mengajar dilakukan dengan tatap muka virtual melalui *video conference*, *teleconference*, dan/atau diskusi dalam grup di media sosial atau aplikasi pesan

c. Menggunakan *Learning Management System* (LMS) yaitu sistem pengelolaan pembelajaran terintegrasi secara daring melalui aplikasi, contohnya *google classroom*

d. Memfasilitasi pembelajaran jarak jauh luring menggunakan media buku, modul atau media televisi maupun radio

Karakteristik yang kedua dalam birokrasi adalah fragmentasi. Fragmentasi adalah penyebaran tanggungjawab dalam pelaksanaan tugas yang melibatkan unit di luar organisasi. Konsekuensi buruk dari fragmentasi birokrasi usaha untuk menghambat koordinasi. Para birokrat dengan alasan prioritas dari organisasinya masing masing mendorong para birokrat untuk menghindari koordinasi dengan organisasi lain, padahal penyebaran wewenang dan sumber untuk melaksanakan kebijakan membutuhkan koordinasi. Sehingga semakin besar koordinasi yang diperlukan untuk melaksanakan kebijakan, semakin berkurang kemungkinan untuk berhasil. Dari penjelasan diatas, maka fragmentasi yang dimaksud adalah penyebaran tanggungjawab pelaksana tugas yang dilaksanakan tanpa ada tumpang tindih dengan tetap mencakup pembagian tugas secara menyeluruh dalam melaksanakan suatu kebijakan.

Kepala sekolah merupakan pimpinan tertinggi dalam struktur organisasi disekolah. Oleh karena itu, kepala sekolah sebagai komando dalam menyampaikan dan membuat keputusan melalui instruksinya. Wakil kepala merupakan jembatan penghubung antara kepala sekolah dan guru dalam pengimplementasian kegiatan BDR secara daring. Sehingga terciptalah hubungan timbal balik dalam pengorganisasian demi melaksanakan kebijakan dengan sebaik mungkin. Berdasarkan surat edaran Kemendikbud Nomor 15 Tahun 2020 mengenai Pedoman Pelaksanaan Belajar Daring Selama COVID-19, kepala sekolah memberikan instruksi kepada guru untuk melaksanakan kegiatan BDR secara daring sesuai dengan pedoman dalam surat edaran tersebut. Adapun waktu pembelajaran

daring sepanjang hari menyesuaikan ketersediaan waktu, kondisi, dan kesepakatan peserta didik dan orangtua/walinya. Proses pembelajaran daring terdiri atas:

a. Tatap muka virtual melalui *video conference*, *teleconference*, dan/atau diskusi dalam *group* di media sosial atau aplikasi pesan. Dalam tatap muka virtual memastikan adanya interaksi secara langsung antara guru dengan peserta didik.

b. *Learning Management System (LMS)*. LMS merupakan sistem pengelolaan pembelajaran terintegrasi secara daring melalui aplikasi. Aktivitas pembelajaran dalam LMS antara lain pendaftaran dan pengelolaan akun, penguasaan materi, penyelesaian tugas, pemantauan capaian hasil belajar, terlibat dalam forum diskusi, konsultasi dan ujian/penilaian. Contoh LMS antara lain kelas maya rumah belajar, *google classroom*, ruang guru, zenius, edmodo, moodle, siajar LMS seamolec, dan lain sebagainya.

Pihak luar organisasi sekolah seperti wali murid maupun komite sekolah yang merupakan perwakilan dari para wali murid mendukung penuh kebijakan tersebut sebagaimana yang disampaikan oleh Plt. Kepala SMP Negeri 3 Tanjungpinang, Ibu Dra. Nina Ernawati, M.Pd melalui wawancara sebagai berikut: *“Kami melakukan briefing dengan Komite Sekolah mengenai kebijakan BDR secara daring agar para orang tua mengerti bahwasanya kegiatan belajar tatap muka ditiadakan untuk sementara waktu dikarenakan COVID-19”*

Adapun langkah-langkah pelaksanaan kegiatan BDR secara daring oleh pendidik yaitu sebagai berikut.:

a. Pra Pembelajaran

1. Menyiapkan grup *Whatsapp* untuk peserta didik maupun wali murid sebagai media interaksi dan komunikasi
2. Diskusikan dengan orang tua/wali murid peserta didik atau peserta didik akan ketersediaan gadget seperti laptop, *handphone* maupun internet. Kemudian aplikasi pembelajaran apa yang digunakan, cara menggunakan aplikasi tersebut serta menginfokan materi dan jadwal pembelajaran daring
3. Membuat RPP yang sesuai dengan kondisi dan akses pembelajaran daring
4. Memastikan orang tua / wali murid mendukung proses pembelajaran daring

b. Saat pembelajaran secara tata muka virtual

1. Memeriksa kehadiran peserta didik
2. Berdoa sebelum pelajaran berlangsung
3. Menyampaikan materi sesuai metode yang digunakan
4. Memberikan kesempatan peserta didik untuk bertanya, berpendapat maupun diskusi
5. Berkomunikasi dengan orang tua / wali murid peserta didik mengenai penugasan belajar
6. Membuka layanan konsultasi bagi peserta didik yang kesulitan dalam pembelajaran daring

c. Usai pembelajaran

1. Setiap peserta didik mengisi lembar aktivitas sebagai bahan pemanataan belajar harian

2. Mengingatkan orang tua / wali murid untuk mengumpulkan foto lembar penugasan dan aktivitas pembelajaran
3. Memberikan feedback terhadap lembar tugas atau karya peserta didik

IV. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan dapat diambil kesimpulan bahwasanya implementasi pembelajaran daring di SMP Negeri 3 Tanjungpinang pada masa pandemi COVID-19 tahun 2020 berjalan sesuai dengan instruksi dari Kemendikbud maupun Dinas Pendidikan Kota Tanjungpinang, dimana dalam surat edaran Kemendikbud nomor 15 tahun 2020 tertulis bagaimana peran dan tugas untuk Kepala Satuan Pendidikan, dalam hal ini Kepala Sekolah beserta guru selama masa pandemi ini berlangsung. Walaupun masih dalam kondisi pandemi, pembelajaran tetap harus dilakukan karena setiap peserta didik berhak menerima materi pembelajaran selayaknya ketika belajar disekolah, pembelajaran jarak jauh juga merupakan cara alternatif untuk melaksanakan kegiatan pendidikan.

Pembelajaran jarak jauh memerlukan rencana untuk proses penerapannya, karena adanya pandemi COVID-19 ini dimana belajar yang biasanya dilakukan disekolah sekarang dilakukan secara daring. Sebelum pelaksanaan pembelajaran secara daring, pihak sekolah terlebih dahulu berdiskusi kemudian menyampaikan kepada peserta didik maupun wali murid mengenai prosedur kegiatan pembelajaran secara daring. Hal ini bertujuan agar tidak terjadi kesalahpahaman dalam pengimplementasian kebijakan. Kemudian SMP Negeri 3 Tanjungpinang mempersiapkan sumberdaya yang diperlukan dalam kegiatan pembelajaran secara daring seperti jaringan wifi, kuota internet, pembentukan tim yang berisikan 3 guru yang bertujuan membantu guru yang kesulitan dalam mengoperasikan *gadget*, dan para guru mengikuti webinar atau belajar otodidak mengenai pembelajaran secara online. Adanya kerjasama yang baik antara pihak sekolah, peserta didik dan orang tua wali murid dapat menjadi salah satu kunci dalam keberhasilan pembelajaran secara daring.

V. Daftar Pustaka

Buku

Aunurrahman. (2013). Belajar dan Pembelajaran. Bandung: Alfabeta.

Bakry, Noor Ms. 2010. *Pendidikan Kewarganegaraan*. Yogyakarta : Pustaka Pelajar.

Hasbullah. 2009. *Dasar – Dasar Ilmu Pendidikan*. Jakarta: Raja grafindo Persada.

Imron, Ali. 1995. *Kebijakan Pendidikan Indonesia*, Jakarta : Bumi Aksara

Sanjaya, Wina. 2006. *Strategi Pembelajaran Berorientasi Standar Proses Pendidikan*. Jakarta: Kencana Prenada Media Group.

Subarsono, AG .2011, *Analisis Kebijakan Publik : Konsep, Teori dan Aplikasi*. Yogyakarta : Pustaka Pelajar.

Suprihatiningrum, Jamil. 2013. Strategi Pembelajaran, Teori dan Aplikasinya. Jogjakarta: Ar-Ruzz

Media.

Syafaruddin. 2008. *Efektivitas Kebijakan Pendidikan*. Jakarta: PT. Rineka Citra

Tilaar, H.A.R dan Riant Nugroho. 2008. *Kebijakan Pendidikan*. Yogyakarta: Pustaka Belajar

Weimer, David L & Vining, Aidan R. 1999. *Policy Analysis: Concept and Practice, third edition*, Prectice Hall. New Jersey.

Winarno, Budi. 2008, *Kebijakan Publik: Teori dan Proses*, Yogyakarta: Medio Presindo

Jurnal/Artikel

Agus Purwanto. 2020. *Studi Eksploratif Dampak Pandemi COVID-19 Terhadap Proses Pembelajaran Online di Sekolah Dasar*. Jurnal Ilmu Pendidikan, Psikologi dan Konseling . Universitas Pelita Harapan.

Luh Devi Herliandry. 2020. *Pembelajaran Pada Masa Pandemi COVID-19*. Jurnal Teknologi Pendidikan. Universitas Negeri Jakarta.

Mada Sutapa. 2008. Kebijakan Pendidikan dalam Perspektif Kebijakan Publik. Jurnal Manajemen Pendidikan.

Rizqon Halal Syah Aji. 2020. *Dampak COVID-19 pada Pendidikan di Indonesia: Sekolah, Keterampilan, dan Proses Pembelajaran*. Jurnal Sosial dan Budaya Syar'i. UIN Syarif Hidayatullah Jakarta.

Perundang-undangan

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional